

PENGARUH TRANSPARANSI DATA ABSENSI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBAYARAN UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

The Effect of Attendance Data Transparency on the Accountability of Meal Allowance Payments for Civil Servants (ASN) at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Nusa Tenggara Province

Priscila Natasya Dona Vianey Trinita^{1,a)}, Maria Prudensiana Leda Muga^{2,b)}, Herlina Helmy Klau^{3,c)}

^{1,2,3)}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} priscilatrinita1704@gmail.com, ^{b)} maria.muga@staf.undana.ac.id,
^{c)} herlina.klau@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi data absensi terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara data kehadiran dan pembayaran uang makan ASN yang menunjukkan pentingnya transparansi data absensi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 147 ASN yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi data absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan ASN. Semakin baik transparansi data absensi yang diterapkan melalui keterbukaan, aksesibilitas, keakuratan, dan ketepatan waktu informasi, maka semakin tinggi akuntabilitas pembayaran uang makan ASN. Temuan ini memperkuat Teori Agensi bahwa transparansi berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang mengurangi asimetri informasi dalam hubungan keagenan sektor publik.

Kata Kunci : Transparansi Data Absensi, Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan, Aparatur Sipil Negara, Teori Agensi

PENDAHULUAN

Transformasi digital pada era Revolusi Industri 4.0 mendorong perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan menuju tata kelola yang lebih modern, efisien, dan transparan. Penerapan teknologi dalam birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, khususnya melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2019). Transparansi menunjukkan keterbukaan organisasi publik dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi pihak yang

berkepentingan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan penyimpangan (Rosenberg, 2020). Kondisi transparansi yang rendah berpotensi menyebabkan inefisiensi serta melemahkan pertanggungjawaban publik.

Penerapan transparansi dalam birokrasi diwujudkan melalui sistem absensi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem absensi yang sebelumnya dilakukan secara manual telah beralih ke sistem digital yang terintegrasi. Data absensi tidak hanya berfungsi sebagai catatan kehadiran, tetapi juga sebagai dasar dalam menjamin keterbukaan informasi kehadiran pegawai. Transparansi data absensi berkaitan langsung dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, di mana pembayaran uang makan ASN sebagai bagian dari belanja negara harus didukung oleh data kehadiran yang valid dan dapat diverifikasi, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2017.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan sistem absensi digital melalui aplikasi PUSAKA yang merupakan sistem presensi berbasis elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai secara real-time dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian. Penggunaan perangkat fingerprint (finger scan) mendukung proses verifikasi kehadiran pegawai. Namun, hasil pengamatan melalui pra penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan data absensi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2024, ditemukan ketidaksesuaian antara data kehadiran dan pembayaran uang makan ASN di beberapa satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran yang mengakibatkan beberapa pegawai harus melakukan pengembalian dana. Keterbatasan akses data, proses verifikasi yang belum optimal, serta potensi kesalahan dalam rekonsiliasi mencerminkan bahwa transparansi data absensi belum berjalan secara maksimal, yang berdampak langsung pada ketepatan pembayaran uang makan ASN dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari sisi urgensi masalah, penelitian ini secara spesifik mengkaji hubungan langsung antara transparansi data absensi dan akuntabilitas pembayaran uang makan ASN, yang merupakan isu aktual di lingkungan birokrasi Indonesia. Kedua, secara teoritis, penelitian ini mengaplikasikan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) dalam konteks pengelolaan data presensi digital dan pembayaran hak keuangan pegawai, yang masih jarang dilakukan. Ketiga, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (research gap) di mana kajian yang secara spesifik menghubungkan transparansi data absensi dengan akuntabilitas pembayaran uang makan ASN belum banyak ditemukan dalam literatur yang ada, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi orisinal yang spesifik dalam bidang akuntansi sektor publik.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (agency theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan kerja sama antara satu atau lebih pihak sebagai principal (pemilik atau pemberi mandat) dengan pihak lain sebagai agent (pelaksana) yang diberi wewenang

untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas tertentu. Inti dari teori ini terletak pada adanya kontrak atau perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak, di mana agent diharapkan bertindak atas nama serta untuk kepentingan principal. Hubungan agensi secara ideal dibangun atas dasar kepercayaan, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan berbagai persoalan seperti asimetri informasi dan konflik kepentingan yang berpotensi memunculkan risiko moral hazard dan adverse selection. Dalam konteks sektor publik, hubungan keagenan menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak lapisan aktor dan kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Transparansi Data Absensi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimaknai sebagai keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2019; Ambya, 2023). Heald (2006) membedakan transparansi menjadi transparansi internal (inwards transparency) dan transparansi eksternal (outwards transparency). Data absensi merupakan catatan resmi yang memuat informasi kehadiran aparatur seperti waktu masuk, waktu pulang, ketidakhadiran, dan status izin. Penerapan prinsip transparansi pada data absensi membentuk konsep transparansi data absensi, yaitu keterbukaan informasi kehadiran ASN yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi pihak yang berwenang. Transparansi data absensi dalam penelitian ini diukur melalui empat dimensi: (1) Keterbukaan informasi data absensi; (2) Kemudahan akses data absensi; (3) Keakuratan dan integritas data absensi; dan (4) Ketepatan waktu penyajian data absensi.

Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan

Akuntabilitas merupakan konsekuensi dari pemberian wewenang dan kepercayaan dalam penyelenggaraan organisasi publik, didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi (Sinambela, 2018; Mardiasmo, 2019). Uang makan ASN merupakan bagian dari belanja pegawai yang diberikan sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan kehadiran kerja, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Akuntabilitas pembayaran uang makan ASN dalam penelitian ini diukur melalui lima dimensi: (1) Kepatuhan terhadap prosedur pembayaran; (2) Ketepatan perhitungan dan jumlah pembayaran; (3) Kesesuaian pembayaran dengan data absensi yang valid; (4) Kejelasan dan kelengkapan pertanggungjawaban pembayaran; dan (5) Keterkaitan pembayaran dengan peningkatan disiplin dan kinerja ASN.

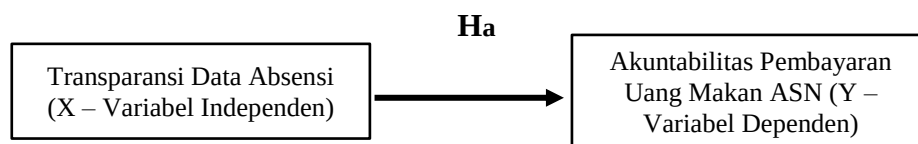
Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada Teori Agensi yang menjelaskan hubungan antara pimpinan instansi sebagai pihak pemberi mandat (principal) dan pegawai sebagai pihak pelaksana tugas (agent). Dalam hubungan tersebut, salah satu permasalahan yang dapat muncul adalah asimetri informasi, yaitu kondisi ketika pimpinan tidak sepenuhnya mengetahui kondisi kehadiran pegawai yang sebenarnya. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses administrasi yang bergantung pada data kehadiran. Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, data absensi menjadi dasar utama dalam perhitungan pembayaran uang makan ASN. Oleh karena

itu, transparansi data absensi diperlukan agar informasi kehadiran pegawai dapat disajikan secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Transparansi tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data kehadiran serta meningkatkan keandalan informasi yang digunakan dalam proses administrasi kepegawaian.

Akuntabilitas pembayaran uang makan ASN tercermin dari kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan proses pembayaran hak pegawai secara tepat sesuai dengan data kehadiran yang ada, baik dari segi kesesuaian jumlah pembayaran, ketepatan waktu penyaluran, maupun kelengkapan bukti administrasi yang mendukung. Dengan demikian, keterkaitan antara transparansi data absensi dan akuntabilitas pembayaran uang makan ASN menjadi dasar alur berpikir dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam kerangka berpikir berikut:

1. TRANSPARANSI DATA ABSENSI (X)
 - a. Keterbukaan Informasi Data Absensi
 - b. Kemudahan Akses Data Absensi
 - c. Keakuratan dan Integritas Data Absensi
 - d. Ketepatan Waktu Penyajian Data Absensi
2. AKUNTABILITAS PEMBAYARAN UANG MAKAN (Y)
 - a. Kepatuhan terhadap Prosedur Pembayaran
 - b. Ketepatan Perhitungan dan Jumlah Pembayaran
 - c. Kesesuaian Pembayaran dengan Data Absensi yang Valid
 - d. Kejelasan dan Kelengkapan Pertanggungjawaban Pembayaran
 - e. Keterkaitan Pembayaran dengan Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha : Transparansi data absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji pengaruh transparansi data absensi sebagai variabel independen (X) terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan sebagai variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2019; Creswell, 2016). Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei-Juni 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, berjumlah 249 orang. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan sampel sebanyak 154 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan dari setiap unit kerja. Dari total 154 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 147 kuesioner berhasil terkumpul kembali dan dapat diolah (tingkat respons 95,45%). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin (Sangat Setuju hingga Sangat Tidak Setuju). Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jumlah Item	Skala Pengukuran
Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan ASN (Y)	Kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan proses dan hasil pembayaran uang makan ASN secara transparan, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Mahsun, 2011; PMK 72/PMK.05/2016 Pasal 9; PMK 210/PMK.05/2022; OECD, 2017)	1. Kepatuhan terhadap prosedur pembayaran. 2. Ketepatan perhitungan dan jumlah pembayaran. 3. Kesesuaian pembayaran dengan data absensi yang valid. 4. Kejelasan dan kelengkapan pertanggungjawaban pembayaran. 5. Keterkaitan pembayaran dengan peningkatan disiplin dan kinerja ASN.	14	Ordinal
Transparansi Data Absensi (X)	Tingkat keterbukaan dan kemudahan akses informasi data absensi ASN yang disajikan melalui sistem presensi berbasis digital secara jelas, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar perhitungan pembayaran uang makan. (Dwiyanto, 2015; Pramusinto & Erwan, 2021; Peraturan Menteri PANRB, 2017)	1. Keterbukaan informasi data absensi. 2. Kemudahan akses data absensi. 3. Keakuratan dan integritas data absensi. 4. Ketepatan waktu penyajian data absensi.	16	Ordinal

Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) Analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data responden dengan kategori skor (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi); (2) Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson; (3) Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha; (4) Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Normal Probability Plot; (5) Uji heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot; (6) Analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen; (7) Uji t untuk menguji signifikansi hipotesis; dan (8) Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bantuan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang terkumpul dari 147 responden, karakteristik responden disajikan sebagai berikut: (1) Berdasarkan usia, didominasi oleh kelompok usia 40-49 tahun (47%), menunjukkan sebagian besar ASN berada pada tahap usia produktif dan telah memiliki pengalaman kerja yang matang; (2) Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki (56%) dan perempuan (44%); (3) Berdasarkan lama bekerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja ≤ 10 tahun (63%); dan (4) Berdasarkan unit kerja, distribusi terbesar berasal dari unit kerja Bimas Kristen, Umum, dan Keuangan & BMN (masing-masing 10%).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kategori
Transparansi Data Absensi (X)	147	45	78	63.11	6.234	Tinggi
Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan (Y)	147	43	65	54.65	4.228	Tinggi

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Transparansi Data Absensi memiliki nilai rata-rata (mean) 63,11 dengan standar deviasi 6,234, yang menunjukkan secara umum responden menilai transparansi data absensi telah diterapkan dengan baik (kategori tinggi) dan jawaban responden cenderung homogen. Variabel Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan ASN memiliki nilai rata-rata 54,65 dengan standar deviasi 4,228, menunjukkan bahwa secara umum akuntabilitas pembayaran uang makan berada pada kategori baik dan persepsi responden relatif konsisten. Kategori skor ditentukan berdasarkan rentang skor teoritis dengan menggunakan rumus interval kelas.

Uji Validitas

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
Transparansi Data Absensi (X)	X1	0.426	0.136	valid
	X2	0.444	0.136	valid
	X3	0.539	0.136	valid
	X4	0.649	0.136	valid
	X5	0.628	0.136	valid
	X6	0.578	0.136	valid
	X7	0.623	0.136	valid
	X8	0.635	0.136	valid
	X9	0.703	0.136	valid
	X10	0.717	0.136	valid
	X11	0.679	0.136	valid
	X12	0.612	0.136	valid
	X13	0.670	0.136	valid
	X14	0.610	0.136	valid
	X15	0.588	0.136	valid
	X16	0.605	0.136	valid
Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan ASN (Y)	Y1	0.234	0.136	Valid
	Y2	0.526	0.136	Valid
	Y3	0.538	0.136	Valid
	Y4	0.560	0.136	Valid
	Y5	0.497	0.136	Valid
	Y6	0.473	0.136	Valid
	Y7	0.504	0.136	Valid
	Y8	0.534	0.136	Valid
	Y9	0.570	0.136	Valid
	Y10	0.481	0.136	Valid
	Y11	0.542	0.136	Valid
	Y12	0.500	0.136	Valid
	Y13	0.535	0.136	Valid
	Y14	0.627	0.136	Valid

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan untuk kedua variabel memiliki nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,136), sehingga semua item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
Transparansi Data Absensi (X)	0.886	> 0.60	Reliabel
Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan (Y)	0.785	> 0.60	Reliabel

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

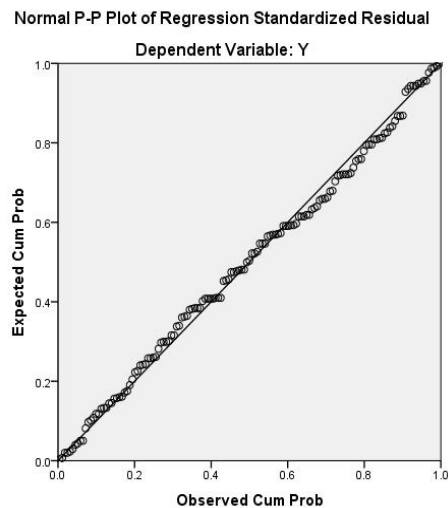
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha untuk kedua variabel $> 0,60$, sehingga semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		147
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39791306
Most Extreme Differences	Absolute	.044
	Positive	.044
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.535
Asymp. Sig. (2-tailed)		.937

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

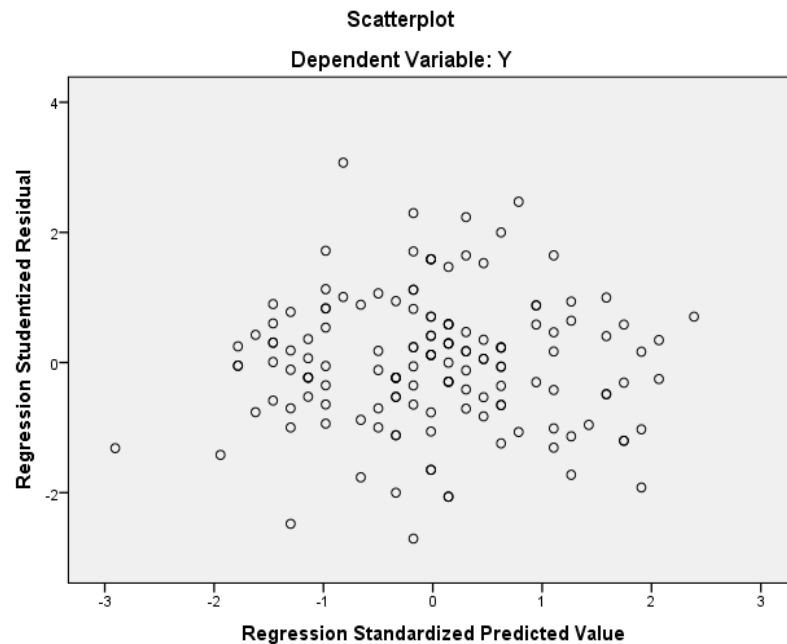


Gambar 2.

Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual), terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Meskipun terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang dari garis diagonal, penyimpangan tersebut tidak bersifat signifikan dan tidak membentuk pola yang menyimpang secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi residual dari model regresi mendekati distribusi normal, sehingga secara visual asumsi normalitas telah terpenuhi. Hasil tersebut diperkuat dengan uji normalitas secara statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,937 > 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2018), model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila residual memiliki distribusi normal, yang dapat dilihat melalui grafik Normal P-P Plot maupun uji statistik normalitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 3.

Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot antara Regression Studentized Residual dengan Regression Standardized Predicted Value, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu vertikal serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Penyebaran titik yang acak tersebut menunjukkan bahwa varians residual pada setiap nilai prediksi relatif konstan, sehingga tidak terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi. Menurut Ghazali (2018), model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, model regresi mampu menghasilkan estimasi koefisien yang efisien.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 6.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.181	2.870		10.166	.000
X	.404	.045	.595	8.915	.000

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan $Y = 29,181 + 0,404X$, yang mengindikasikan bahwa nilai konstanta sebesar 29,181 merupakan nilai akuntabilitas pembayaran uang makan ASN ketika transparansi data absensi bernilai nol, sedangkan koefisien regresi sebesar 0,404 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel transparansi data absensi akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pembayaran uang makan ASN sebesar 0,404 satuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

Uji Signifikasi (t)

Tabel 7.
Hasil Uji Signifikasi (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.181	2.870	10.166	.000
	X	.404	.045	8.915	.000

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel transparansi data absensi diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,166 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Sedangkan t-tabel sebesar 1,655. Karena nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari alpha 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($8,915 > 1,655$) maka hipotesis (H_a) diterima hal ini berarti bahwa variabel transparansi data absensi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pembayaran Uang Makan pada ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.350	3.410
a. Predictors: (Constant), Transparansi Data Absensi				

Sumber: Data Primer (2026, Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,354, yang berarti 35,4% variasi yang terjadi terhadap tinggi rendahnya akuntabilitas pembayaran uang makan ASN dapat dijelaskan oleh variabel transparansi data absensi. Nilai R^2 sebesar 35,4% ini menunjukkan tingkat pengaruh yang secara statistik tergolong lemah hingga sedang. Akan tetapi, variabel transparansi data absensi tetap relevan dan layak untuk dijadikan fokus penelitian ini, meskipun pengaruhnya tidak dominan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi data absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui perspektif Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) sebagai grand theory dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan terjadi secara bertingkat: pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB bertindak sebagai principal tingkat pertama; unit kepegawaian dan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT berperan sebagai agent utama sekaligus principal bagi ASN; dan ASN sebagai sub-agent yang melaksanakan kewajiban presensi harian. Permasalahan utama dalam hubungan keagenan ini adalah asimetri informasi, yang berpotensi menimbulkan moral hazard.

Transparansi data absensi melalui sistem PUSAKA berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang secara langsung menjawab masalah asimetri informasi tersebut. Aplikasi

PUSAKA dilengkapi dengan fitur geofencing, audit trail, dan verifikasi biometrik melalui finger scan yang memastikan data kehadiran terekam secara akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Setiap aktivitas presensi tercatat dalam sistem dengan waktu dan lokasi yang terverifikasi, sehingga memungkinkan proses rekonsiliasi data dilakukan secara transparan. Ketika data absensi tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti unit keuangan dan pengawas internal, maka proses verifikasi pembayaran uang makan menjadi lebih objektif dan akurat. Hal ini mengurangi ruang terjadinya perilaku oportunistik dari ASN maupun petugas administrasi, sehingga akuntabilitas pembayaran uang makan dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Mardiasmo (2019) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik karena melalui keterbukaan informasi, setiap penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Indikator transparansi data absensi yang meliputi keterbukaan informasi, kemudahan akses data, keakuratan dan integritas data, serta ketepatan waktu penyajian data secara langsung mendukung dimensi akuntabilitas pembayaran uang makan, baik akuntabilitas prosedural, keuangan, maupun kinerja.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Afdila et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan e-absensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui peningkatan akurasi data kehadiran dan minimalisasi manipulasi. Penelitian Hernawan & Pratidina (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan presensi online melalui aplikasi PUSAKA dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas dan menghasilkan data kehadiran yang lebih akurat, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil dan potensi kecurangan melalui penitipan perangkat. Fajri & Arif (2024) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara. Merchilia & Robinson (2024) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama memengaruhi kinerja keuangan organisasi perangkat daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji transparansi data absensi secara khusus sebagai variabel yang memengaruhi akuntabilitas pembayaran uang makan ASN. Kekhususan fokus ini memberikan kontribusi yang lebih terarah pada aspek micro-accountability dalam pengelolaan belanja pegawai, yang selama ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 35,4% menunjukkan bahwa transparansi data absensi tetap merupakan prasyarat (prerequisite) yang fundamental bagi berjalannya variabel-variabel lain secara efektif. Tanpa data absensi yang transparan dan akurat, variabel-variabel lain seperti sistem pengendalian internal, komitmen pimpinan, dan budaya organisasi tidak dapat berfungsi optimal dalam mendukung akuntabilitas pembayaran. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi data absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pembayaran uang makan ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semakin tinggi tingkat transparansi data absensi yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses, keakuratan dan integritas data, serta ketepatan waktu penyajian data, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pembayaran uang makan ASN. Temuan ini sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa transparansi dapat mengurangi asimetri informasi dan mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Saran

Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, disarankan untuk terus mempertahankan dan mengoptimalkan penerapan sistem transparansi data absensi, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dan verifikasi pembayaran uang makan ASN. Digitalisasi sistem absensi dan administrasi pembayaran perlu diperkuat untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi yang digunakan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait administrasi kepegawaian, manajemen keuangan, dan penggunaan aplikasi PUSAKA dan finger scan akan membantu mempertahankan kualitas transparansi dan akuntabilitas.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pembayaran, seperti sistem pengendalian internal, komitmen pimpinan, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan sasaran anggaran, mengingat nilai koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini hanya sebesar 35,4%. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed-method, serta memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdila, N., Lubis, T., Nasution, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh E-Absensi Dan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 7–21. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2755>
- Ambya. (2023). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah*. Graha Ilmu.
- BPK RI. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Ke-4). Pustaka Pelajar.
- Fajri, M. A., & Arif, M. (2024). Kualitas Tata Kelola Keuangan Di Kementerian Agama Sumatera Utara: Studi Kepustakaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 117–128. <http://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/113>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heald, D. (2006). *Transparency as an instrumental value*. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 59–73). Oxford University Press.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2024). Efektivitas Penerapan Presensi Online Pegawai ASN Pada Aplikasi Super Apps Pusaka (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 45–58. <https://pdfs.semanticscholar.org/3262/24a66058a12796842d129900d130b4972aa4.pdf>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mahsun, M. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rodakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu*. *Edunomika*, 8(01), 1–11.
- OECD. (2017). *OECD Recommendation of the Council on Public Integrity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264264198-en>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Sistem Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Pramusinto, A., & Erwan, M. (2021). Transparansi Tata Kelola Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 150–165.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Rosenberg, R. (2020). *Transparency and Accountability in the Public Sector*. Routledge.
- Sinambela, L. P. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014).